

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi (S1)**

**Pada Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun oleh:  
HELENA SIHOMBING**

**NPM: 15 04 22128**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2020**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

**No. 808/J/I**

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Drs. YB. Sigit Hutomo, MBAcc., Akt., CA., CSA. | Ketua Penguji |
| 2. Dr. Nuritomo, SE., M.Acc.                      | Anggota       |
| 3. Sang Ayu Putu PG, SE., M.Acc., Ak., CA.        | Anggota       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Helena Sihombing

NPM 150422128

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Helena Sihombing telah selesai direvisi dan revisiantersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

**SKRIPSI**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017**

**Disusun oleh:**

**Helena Sihombing**

**NPM: 15 04 22128**

**Telah dibaca dan disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing**

**Sang Ayu Putu Piastini G., SE., M.Acc., Ak., CA**

**Tanggal 9 Oktober 2020**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul:

### **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017**

Benar – benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Helena Sihombing

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan berkat, karunia, dan hikmat yang senantiasa diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul

**“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017”**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jenjang Pendidikan Strata Satu program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terlepas kekurangan yang ada dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi segala pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak mungkin dapat disusun dan diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada:

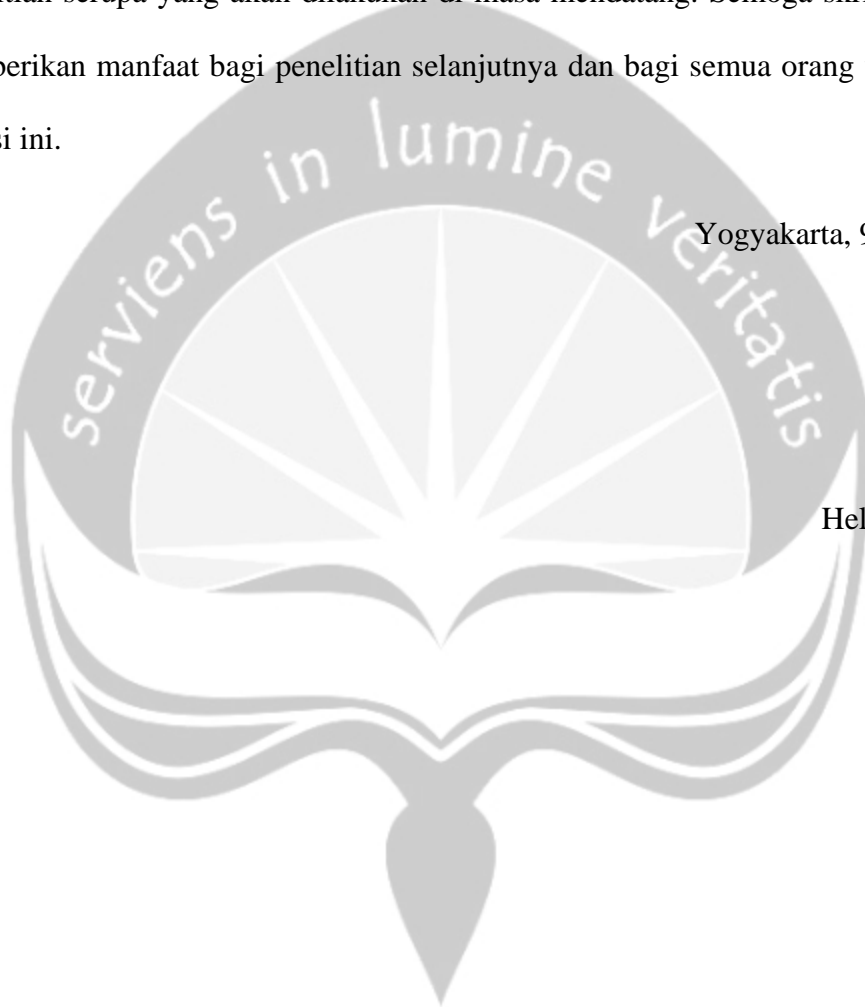
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan jalan bagi penulis dalam setiap pergumulan hidup saat menulis skripsi.
2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan di setiap bidang, baik *support* moral dan juga materi selama penulis mengerjakan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

3. Ibu Sang Ayu Putu Piastini G., SE., M.Acc., Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan sepenuh hati, sabar dan serta meluangkan waktu dan memberikan motivasi dan semangat yang tak pernah henti.
4. Para dosen dan staff TU yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat dan ilmu saat penulis mengerjakan penelitian selama menempuh kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Teman SMA saya Aulia Tri Kemala Wardani memberikan waktunya dalam setiap perjalanan skripsi ini.
6. Teman-teman kuliah yang mendampingi sampai saat ini, Ocla, Winda, There, Yuli, Lady, Cia, Seba, Liana, Deo, dan Sabina.
7. Staff Perpustakaan dan Student staff periode 1 Agustus – Januari 2020 yang memberikan semangat dan nasihat selama bagi penulis.
8. Teman-teman KOPMA UAJY dan pengawas semester ganjil 2019/2020.
9. Bu suprianti dan keluarga sebagai induk semang KKN 75 Padukuhan Sengdangrejo beserta teman-teman hidup bersama selama satu bulan Vio, Mondip, Tannya, Cicil, Aldo, Jerry, Marchel, Leon, dan ino.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan selalu melimpahi berkat dan kebahagiaan dalam hidup kalian semua. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan segala kritik ataupun saran yang ada dapat diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian serupa yang akan dilakukan di masa mendatang. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya dan bagi semua orang yang membaca skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Oktober 2020

Helena Sihombing



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	2
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematis Penulisan .....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Teori Keagenan .....	10
2.2.1. Kepemilikan Keluarga .....	12
2.2.2. Kepemilikan Pemerintah.....	14
2.2.3. Kepemilikan Asing .....	16
2.3. Perpajakan .....	16
2.3.1. Definisi Pajak.....	16
2.3.2. Fungsi Pajak.....	18
2.4. Penghindaran Pajak .....	19
2.5. Penelitian Terdahulu.....	22
2.6. Pengembangan Hipotesis .....	28
2.6.1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak .....	28



2.6.2. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak .....	29
2.6.3. Pengaruh kepemilikan Asing terhadap penghindaran pajak .....	30
BAB III .....	32
METODOLOGI PENELITIAN .....	32
3.1. Jenis Penelitian .....	32
3.2. Objek Penelitian .....	32
3.3. Populasi Penelitian .....	32
3.4. Sampel Penelitian .....	32
3.5. Variabel Penelitian .....	32
3.5.1. Variabel Independen .....	32
3.5.2. Variabel Dependen .....	34
3.6. Operasionalisasi Variabel .....	34
3.7. Model Penelitian .....	37
3.8. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.9. Analisa Data .....	38
3.9.1. Uji Normalitas .....	38
3.9.2. Uji Multikolonieritas .....	38
3.9.3. Uji Heteroskedastisitas .....	39
3.9.4. Uji Autokorelasi .....	40
3.9.5. Statistik Deskriptif .....	41
3.10. Uji Hipotesis .....	41
3.10.1. Model Pengujian Statistik .....	41
3.10.2. Notasi Statistika .....	42
3.10.3. Tingkat Kesalahan .....	42
3.10.4. Kriteria Pengujian Statistik .....	44
BAB IV .....	47
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	47
4.1. Sampel Penelitian .....	47
4.2. Analisis Hasil Uji Pendahuluan .....	47
4.2.1. Statistik Deskriptif .....	47

4.2.2. Uji Normalitas.....	49
4.3. Uji Asumsi Klasik .....	51
4.3.1. Uji Multikolonieritas.....	51
4.3.2. Uji Autokorelasi.....	52
4.4. Analisis Regresi linier berganda.....	54
4.4.1. Uji Nilai t .....	57
4.4.2. Uji Nilai F .....	58
4.4.3. Koefisien Determinasi .....	59
4.5. Analisis Hasil Penelitian .....	60
4.5.1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak.....	60
4.5.2. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak .....	60
4.5.3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak.....	61
BAB V .....	64
PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Keterbatasan dan Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
DAFTAR WEBSITE .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pengukuran Penghindaran Pajak.....	21
Tabel 2.2. Tabel Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel .....	35
Tabel 3.2. Kriteria Pengambilan Keputusan Durbin Watson.....	40
Tabel 4.1. Pemilihan Sampel Penelitian .....	47
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif sebelum Transformasi.....	47
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif setelah Transformasi .....	48
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Cash ETR sebelum Transformasi .....	49
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas GAAP ETR sebelum Transformasi .....	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Cash ETR setelah Transformasi .....	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas GAAP ETR setelah Transformasi .....	50
Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolonieritas Cash ETR.....	51
Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolonieritas GAAP ETR.....	51
Tabel 4.10. Hasil Uji Autokolerasi Cash ETR.....	52
Tabel 4.11. Hasil Uji Autokolerasi GAAP ETR .....	53
Tabel 4.12. Hasil Uji Heteroskedastisitas Cash ETR.....	54
Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas GAAP ETR.....	54
Tabel 4.14. Hasil Pengujian Linier Berganda Cash ETR.....	55
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Linier Berganda GAAP ETR.....	56
Tabel 4.16. Hasil Uji Nilai F Cash ETR .....	58
Tabel 4.17. Hasil Uji Nilai F GAAP ETR .....	58
Tabel 4.18. Hasil Koefisien Determinasi Cash ETR.....	59
Tabel 4.19. Hasil Koefisien Determinasi GAAP ETR.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tingkat Keyakinan .....	43
-------------------------------------	----

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017**

**Helena Sihombing**

**Sang Ayu Putu Piastini G., SE., M.Acc., Ak., CA**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 43-44 Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel bebas yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak sebagai variabel terikatnya. Penelitian dilakukan dengan objek penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Kriteria sampel penelitian adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017, perusahaan manufaktur yang memiliki EBT positif selama periode penelitian tahunan 2014-2017, dan perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan dari tahun 2014-2017 yang memiliki data lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian dan memiliki nilai *Cash ETR* dan *GAAP ETR* lebih kecil 1. Perusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria *purposive sampling* diperoleh hasil jumlah data observasi sebanyak 69 laporan keuangan perusahaan. Data laporan keuangan perusahaan digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci: kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, penghindaran pajak, perusahaan manufaktur.**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang bersumber dari wajib pajak. Dalam penerapannya pajak merupakan sebuah iuran yang bersifat memaksa bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakan kepada pemerintah. Pendapatan pajak digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia. Pendapatan pajak menjadi salah satu penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Penerimaan APBN bersumber dari hibah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan pajak. Dana terbesar diperoleh dari penerimaan pajak dapat dilihat pada APBN 2018 dengan kontribusi sebesar Rp 1.521,4 triliun atau sebesar 78,33 % ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Kinerja penerimaan pajak dapat dilihat dari *tax ratio* yang merupakan presentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Ukuran *tax ratio* dapat menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Di Indonesia sampai pada akhir tahun 2018 nilai rasio pajak berada diangka 11,5% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pajak menjadi sumber dana pemerintah yang potensial dilihat dari besarnya penerimaan perpajakan. Namun, dalam melaksanakan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan pemerintah sebagai negara dengan wajib pajak yaitu perusahaan. Pajak bagi negara adalah satu dari beberapa sumber penerimaan penting yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Suandy, 2016). Negara menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dari wajib pajak. Sedangkan, pajak bagi perusahaan adalah kewajiban sebagai bentuk kontribusi terhadap negara namun akan mengurangi laba bersih perusahaan. Berkurangnya laba bersih perusahaan menimbulkan kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat diminimumkan dengan berbagai cara, yaitu masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) atau yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Meminimalkan kewajiban perpajakan dikenal dengan istilah lain yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion* (Suandy, 2016). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui pemanfaatan celah peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak sebagai dampak dari beban pajak yang memberatkan bagi perusahaan dan pemilik (Chen, 2010). Perusahaan memanfaatkan penghindaran pajak untuk mendapatkan *outcome* pajak yang menguntungkan dengan terdapatnya ketidakjelasan regulasi (Dyreng *et al.*, 2008). Struktur kepemilikan terdiri dari dua jenis yang biasanya digunakan yaitu struktur kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*) dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*).

Dominasi pemegang saham pada perusahaan menentukan struktur kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsentrasi pemegang saham pada satu atau suatu kelompok pemegang saham disebut perusahaan dengan struktur terkonsentrasi (*closely held*) dan kepemilikan saham tersebar disebut sebagai perusahaan yang kepemilikannya tersebar (*dispersed ownership*) (Nuritomo dan martani, 2016). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan yang terkonsentrasi mampu mengurangi konflik keagenan, karena perusahaan dikelola serta dikontrol oleh pihak yang sama. Hal ini mengakibatkan kerugian dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan keinginan perusahaan.

Dua pertiga emiten negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara di pasar modal dijalankan oleh keluarga (Claesseens *et al.*, 2002). Lebih dari 95% bisnis di Indonesia adalah milik keluarga ([www.pwc.com](http://www.pwc.com)). Menurut Rusydi dan Martani (2014) saat mengidentifikasi kepemilikan saham keluarga melalui proporsi saham lebih dari 5% yang dimiliki oleh keluarga. Dalam penelitian Chen *et al.* (2010) kepemilikan keluarga memilih membayar pajak lebih besar dibandingkan harus membayar denda pajak dan terjadi rusaknya reputasi perusahaan.

Selain kepemilikan keluarga, terdapat kepemilikan pemerintah atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Riyadi dan Halim (2018) penerimaan negara dari BUMN diberikan dalam bentuk dividen dan penerimaan pajak. Kinerja bagus yang dimiliki oleh direksi BUMN akan memperoleh promosi jabatan yang lebih tinggi dan mendapatkan insentif dari pemerintah (Rusydi

dan Martani, 2014). Hal ini mampu mendorong pihak direksi atau manajemen dari BUMN melakukan penghindaran pajak.

Dalam struktur kepemilikan terdapat juga kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham asing dalam perusahaan. Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dari kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi ketimbang perusahaan yang beroperasi lintas domestik (Asfiyati, 2012).

Penelitian ini memakai alat ukur penghindaran pajak yang digunakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010). Terdapat cara pengukuran penghindaran pajak sebanyak 12 teknik, tetapi penelitian ini memakai ukuran penghindaran pajak yaitu *cash* ETR dan GAAP ETR. *Cash* ETR digunakan dengan harapan mampu mencerminkan penghindaran pajak yang terjadi melalui adanya perbedaan *book-tax* permanen dan temporer (Chen *et al.*, 2010). Penggunaan GAAP ETR diharapkan dapat memberikan penjelasan utuh mengenai beban pajak mampu berdampak pada laba akuntansi.

Terdapat hasil yang berbeda-beda pada beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian Adhikari *et al.* (2006) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Rusydi dan Martani (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016) menunjukkan hasil bahwa



kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010) diperoleh kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ha dan Phan. (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Riyadi dan Halim (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah atau BUMN sendiri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Asfiyati (2012) dan Sari dan Martani (2010) menunjukkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini bermaksud menguji kembali penelitian terdahulu yaitu pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, pemerintah, dan asing terhadap penghindaran pajak. Peneliti mengambil objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari sub sektor industri sehingga mampu menggambarkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak jika dibandingkan dengan emiten lainnya sehingga mampu memperoleh sampel lebih banyak dan Industri manufaktur memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyector pajak ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)).

Sesuai dengan uraian di atas, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Maka peneliti mengangkat judul penelitian “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang dan hasil dari penelitian sebelumnya yang berbeda-beda, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing terhadap penghindaran pajak dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

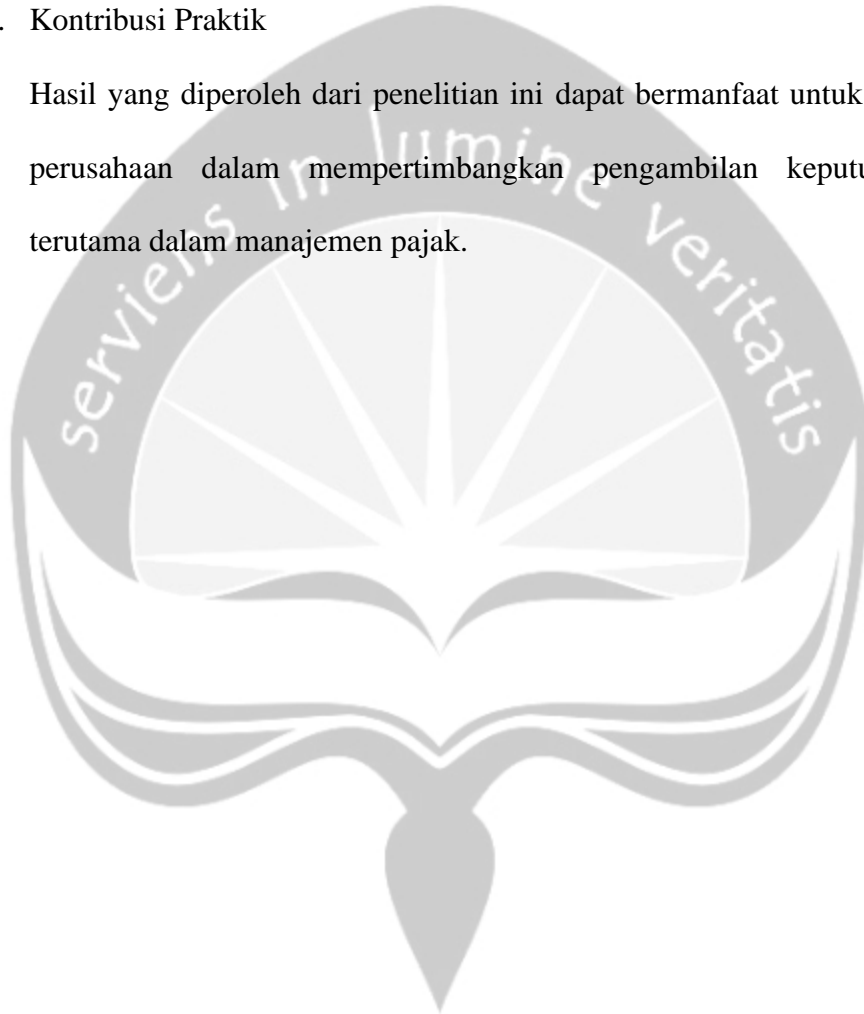
## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kontribusi teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan individu serta menjadi sumber referensi maupun acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam permasalahan sejenis.

## 2. Kontribusi Praktik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam manajemen pajak.



## **1.5. Sistematis Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari kontribusi teori dan praktik, serta sistematis penulisan.

### **Bab II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung variabel penelitian, uraian tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan tentang rancangan data yang digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merancang model untuk menguji hipotesis secara statistik.

### **Bab IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan tentang analisis hasil dari uji pendahuluan, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

### **Bab V : PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Teori agensi (*agency theory*) didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh satu orang atau lebih (*principal*) dengan memberikan delegasi wewenang kepada orang lain (*agent*) dalam pengambilan keputusan untuk mengelola perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* sering disebut sebagai pemberi kerja, sedangkan *agent* sering disebut sebagai pihak manajemen perusahaan yang bekerja untuk *principal*. *Agent* melakukan suatu jasa tertentu dengan tujuan agar kepentingan dari pihak *principal* dapat tercapai.

Dalam teori agensi terdapat kemungkinan dapat terjadinya konflik antara *principal* dengan *agent* yang disebut dengan konflik agensi (*agency conflict*). Konflik agensi dapat terjadi ketika *principal* memberikan insentif kepada manajemen perusahaan (*agent*) atas kinerja yang dilakukan untuk mengoptimalkan kepentingan *principal*. Masalah muncul ketika terdapat dua kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent*, yaitu *agent* lebih mengejar insentif daripada mengoptimalkan kepentingan *principal* yang merupakan tujuan utama dari perjanjian yang telah dilakukan.

Masalah keagenan tidak selalu terjadi karena adanya konflik pada *principal* dengan *agent* saja, dapat berlaku juga pada pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Menurut Panda *et al* (2017) *agency problem* terdiri dari tiga tipe, yaitu:

1. Tipe 1 (*Principal-Agent Problem*)

*Agency problem* tipe pertama terjadi diantara *principal* atau pemilik dengan manajer di dalam perusahaan yang disebabkan karena adanya pemisahan kepemilikan atas kontrol perusahaan. *Principal* mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dengan tujuan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan *principal*.

2. Tipe 2 (*Principal-Principal Problem*)

Di dalam tipe kedua ini *agency problem* disebabkan karena adanya konflik diantara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham mayoritas memiliki hak kontrol yang lebih besar daripada pemegang saham yang lebih kecil (minoritas).

3. Tipe 3 (*Principal-Creditor Problem*)

*Agency problem* didalam tipe ketiga ini disebabkan karena konflik diantara pemilik dengan kreditor yang disebabkan karena keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak *shareholder*, dimana *shareholder* mencoba untuk menginvestasikan sejumlah uang mereka untuk investasi yang lebih berisiko (*risk-taker investor*) dan investor mengharapkan *return* yang tinggi. Resiko ini

dapat menyebabkan meningkatnya biaya-biaya keuangan dan menurunkan nilai hutang yang akan berdampak terhadap kreditor.

## **2.2. Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan dapat berpatokan pada pemegang saham dominan suatu perusahaan. Struktur kepemilikan terdapat dua jenis yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*) dan struktur kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*). Perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh satu atau suatu kelompok pemegang saham disebut perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi (*closely held*), sebaliknya perusahaan yang saham kepemilikan menyebar disebut sebagai perusahaan yang kepemilikannya tersebar (*dispersed ownership*) (Nuritomo dan Martani, 2014). Menurut Claessens *et al.* (2002) mayoritas perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi berada di Asia salah satunya adalah Indonesia. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah (BUMN), dan kepemilikan asing.

### **2.2.1. Kepemilikan Keluarga**

Menurut Rusydi dan Martani (2014) saat mengidentifikasi kepemilikan saham keluarga melalui proporsi saham lebih dari 5% yang dimiliki oleh keluarga. Dalam penelitian Chen *et al.* (2010) kepemilikan keluarga memilih membayar pajak lebih besar dibandingkan harus menanggung denda pajak dan terjadi rusaknya reputasi perusahaan. Adapun karakteristik dari perusahaan keluarga adalah sebagai berikut (Donnelley, 1988):

1. Hubungan keluarga merupakan faktor terpenting yang menentukan suksesi manajemen.
2. Istri atau putra dari direktur utama tercatat sebagai dewan direksi.
3. Nilai-nilai kelembagaan yang penting bagi perusahaan dibentuk oleh keluarga pemilik, baik secara formal ataupun informal.
4. Tindakan anggota keluarga merefleksikan atau dianggap mencerminkan reputasi perusahaan, terlepas dari jabatannya dari manajemen.
5. Kerabat pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk menyimpan saham perusahaan lebih dari sekedar alasan keuangan, terutama ketika perusahaan dalam kondisi rugi.
6. Jabatan anggota keluarga di perusahaan menandakan kedudukannya dalam keluarga.
7. Anggota keluarga harus mengikuti kebijakan perusahaan dalam hal perkembangan kariernya sendiri.



### 2.2.2. Kepemilikan Pemerintah

Struktur kepemilikan pemerintah merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah (Riyadi dan Halim, 2018). Kepemilikan pemerintah didefinisikan pemerintah/negara memiliki proporsi saham pada perusahaan yang lebih besar (Rusydi dan Martani, 2014). Kepemilikan pemerintah di Indonesia yaitu Badan Usaha Umum Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003.

#### 2.2.2.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam UU No.19 Tahun 2003, BUMN digolongkan menjadi 3 entitas sebagai berikut:

1. BUMN Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. BUMN Perseroan Terbuka merupakan persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
3. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dari kelima poin di atas, kesimpulan dari pendirian BUMN adalah menjadi sektor pelopor berbagai kegiatan usaha di Indonesia dan mampu memproduksi produk ataupun jasa dengan kualitas terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Tidak hanya mencari keuntungan, BUMN diharapkan mampu memberikan dampak positif pada lingkungan usaha dengan merangkul pengusaha kelas bawah, koperasi dan masyarakat melalui cara pembimbingan dan bantuan.

Segala kegiatan yang dilakukan BUMN pada akhirnya wajib memberikan kontribusi pada negara Indonesia terkait perekonomian nasional dan penerimaan negara.

### **2.2.3. Kepemilikan Asing**

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dalam kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan. Proporsi saham yang berstatus luar negeri dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya merupakan kepemilikan asing (Rusyadi dan Martani, 2014). Kepemilikan asing lebih menitik beratkan pada status asal dari penanam modal, jika berasal dari luar wilayah Indonesia maka dianggap sebagai kepemilikan asing.

## **2.3. Perpajakan**

### **2.3.1. Definisi Pajak**

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Fidel (2010) memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara secara wajib bukan merupakan perampokan atau perampasan harta kekayaan rakyat, namun dalam hal ini rakyat dianggap telah menyetujui penarikan pajak. Tujuan dibentuknya undang-undang mengenai kebijakan perpajakan adalah untuk mengikat semua orang agar mematuhi dan terciptanya keadilan dan terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Maka unsur-unsur yang terdapat dalam pajak sebagai berikut:

1. Negara menerima iuran dari rakyat.
2. Undang-undang sebagai dasar.
3. Negara tidak secara langsung dapat ditunjuk memberikan timbal balik jasa atau kompensasi.
4. Diperuntukkan dalam pembiayaan negara yaitu seperti pengeluaran-pengeluaran yang dapat berguna untuk rakyat secara luas.

Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak dapat menjadi salah satu penyebab hambatan untuk memungut pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak terdapat hambatan yang kategorikan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlawanan Pasif

Wajib pajak melakukan perlawanan pasif (enggan) membayar pajak dikarenakan beberapa faktor seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, adanya sistem perpajakan yang rumit, atau sistem kontrol yang tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Perlawanan Aktif

Wajib pajak melakukan perlawanan aktif melalui tindakan nyata dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk penghindaran pajak ini dapat berupa *tax avoidance* atau *tax evasion*.

### 2.3.2. Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak yang dikenakan pada masyarakat, yaitu (Fidel, 2010):

#### 1. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Dana yang dikumpulkan pemerintah demi keperluan membiayai belanja negara untuk kepentingan dan keperluan segenap masyarakat merupakan fungsi pajak. Pemungutan pajak dengan tujuan mengumpulkan penerimaan guna mendanai atau mencukupi dalam membiayai belanja negara biasa disebut *revenue adequacy*. Dapat disimpulkan fungsi finansial yaitu pajak bagi pemerintah merupakan sumber dana (saat seperti ini, pajak bagi pemerintah merupakan sumber dana paling utama, dikarenakan sumber dana lainnya mulai berkurang, misalnya minyak bumi dan gas bumi) guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara sebanyak-banyaknya.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Memberikan kepastian hukum merupakan tujuan fungsi mengatur (*Regulerend*). Terutama merumuskan ketentuan dalam undang-undang perpajakan agar senantiasa menghindari timbulnya interpretasi yang tidak

sama antara fiskus dan wajib pajak. Perlu dipahami, bahwa fungsi pajak tidak sebatas hanya memperoleh uang untuk kas negara. Fungsi pajak dalam menjalankan Negara Republik Indonesia juga digunakan untuk melakukan berbagai kebijakan di bidang sosial, ekonomi, moneter budaya dan bidang lainnya.

Dua fungsi pajak di atas memiliki tujuan yang berbeda. Fungsi finansial (*budgeter*) lebih bertujuan pada bidang keuangan yaitu pendanaan negara. Fungsi mengatur (*Regulerend*) berkaitan dengan hukum dan kebijakan-kebijakan pajak. Namun, hasil akhir dari semua itu untuk kepentingan warga Negara Republik Indonesia.

#### **2.4. Penghindaran Pajak**

Penghematan pajak dapat dilakukan dalam ketentuan perpajakan (*lawful*) biasa disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan terdapat cara di luar ketentuan perpajakan yaitu melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) dikenal sebagai *tax evasion* (penggelapan pajak). Penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih di dalam ketentuan pajak (*lawful*). Penghindaran pajak bisa terjadi pada undang-undang secara bunyi ketentuan atau tertulis dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat terjadi juga dalam undang-undang secara bunyi ketentuan atau tertulis tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2016). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah berupa tindakan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Penghindaran pajak bersangkutan dengan rencana transaksi untuk memperoleh manfaat, keuntungan, atau mengurangi pajak yang tidak diharapkan oleh peraturan pajak (Brown, 2012).

Dari penjelasan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas dapat disimpulkan merupakan tindakan mendapatkan manfaat, keuntungan, atau pengurangan pajak masih dalam ketentuan perpajakan. Metode penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara penghematan pajak seperti ini memang tidak dilarang namun memiliki penilaian negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan bagi kantor pajak.

Penghindaran pajak memiliki tiga karakter menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai berikut:

1. Terdapat berbagai peraturan seperti terkandung pada peraturan yang sebenarnya tidak ada ini merupakan unsur artifisial, dan ketiadaan faktor pajak dalam melakukannya.
2. Terjadi skema semacam perbedaan maksud tujuan pembuat undang-undang dengan menggunakan *loopholes* pada undang-undang atau menyalahgunakan ketetapan-ketetapan legal guna kepentingan pribadi.
3. Melakukan penghindaran pajak para konsultan umumnya menunjukkan cara atau alat yaitu menerapkan skema dalam bentuk kerahasiaan. Para konsultan

mensyaratkan wajib pajak menjaga kerahasiaan selama melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2016).

Berbagai macam cara dapat digunakan guna mengukur penghindaran pajak. Terdapat dua belas cara dalam mengukur penghindaran pajak yang dapat digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

**Tabel 2.1.**

**Pengukuran Penghindaran Pajak**

Pengukuran	Rumus
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum (\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum (\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
<i>DTAX</i>	$\text{Error term from the following regression: } ETR \text{ differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1}))$
<i>Temporary BTD</i>	$\text{Deffered tax expense} / \text{U.S.STR}$
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from BTD/Tait} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$
<i>Unrecognized tax benefit</i>	$\text{Disclosed amount post-FIN48}$
<i>Tax shelter activity</i>	$\text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$
<i>Marginal tax ratio</i>	$\text{Simulated marginal tax rate}$



## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Adhikari *et al.* (2006) dilakukan di Kuala Lumpur *Stock Exchange* (KLSE) tahun 1990-1999 pada perusahaan yang terdaftar. Variabel independen penelitian ini kepemilikan pemerintah dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menemukan jika struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Rusydi dan Martani (2014) Penelitian dengan objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 memiliki tiga variabel independen berupa kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah dengan variabel dependen penghindaran pajak. Hasil penelitian diperoleh kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun kepemilikan asing dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Chen *et al* (2010) dengan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di indeks S&P 1550 memiliki variabel independen perusahaan keluarga dengan variabel dependen agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif terhadap penghindaran pajak ketimbang perusahaan non-keluarga. Hal ini karena perusahaan keluarga lebih mempertimbangkan reputasi perusahaan mereka. Jadi, mereka lebih mementingkan masalah reputasi dibandingkan dengan harus menghindari beban pajak.

Penelitian oleh Riyadi dan Halim (2018) memiliki objek penelitian perusahaan milik pemerintah yang terdaftar di BEI memiliki variabel independen yaitu kepemilikan pemerintah dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian membuktikan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak dan *Initial Public Offering* untuk perusahaan pemerintah membuat tingkat penghindaran pajak menjadi semakin rendah.

Ha dan Phan (2017) melakukan penelitian dengan objek perusahaan di pasar saham Vietnam sejak tahun 2009 sampai 2015. Variabel independen yaitu struktur kepemilikan pemerintah dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Purnomo (2016) melakukan penelitian pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 memiliki tiga variabel independen yaitu kepemilikan keluarga, asing, dan pemerintah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Hasil penelitian membuktikan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara itu kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Asfiyati (2012) melakukan penelitian pada perusahaan terdaftar di BEI tahun 2010 memiliki tiga variabel independen yaitu *corporate governance*, kepemilikan keluarga

dan karakteristik perusahaan dengan variabel dependen *tax avoidance*. Hasil penelitian membuktikan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan keluarga dan karakteristik perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sari dan Martani (2010) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2008 memiliki *corporate governance* dan kepemilikan keluarga serta variabel dependen agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Tabel 2.2.**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Adhikari <i>et al.</i> (2006)	Variabel Independen: Kepemilikan Pemerintah  Variabel Dependen: Penghindaran Pajak  Variabel Kontrol: <i>Size</i> <i>Leverage</i> <i>ROA</i> <i>Market-to-book ratio</i> <i>Asset Mix</i>	Perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) tahun 1990-1999	Struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
2.	Rusydi dan Martani (2014)	Variabel Independen: - Kepemilikan keluarga - Kepemilikan asing - Kepemilikan pemerintah  Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012.	1. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	Chen <i>et al.</i> (2010)	Variabel Independen: <i>Family Firms</i>  Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Perusahaan yang terdaftar di indeks S&P 1550 pada tahun 1996-2000.	1. <i>Family firms</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
4.	Ha dan Phan. (2017)	<p>Variabel Independen: Kepemilikan Pemerintah</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran pajak</p> <p>Variabel Kontrol: <i>Size</i> <i>Debt</i> PP&amp;E ROA</p>	Perusahaan di pasar saham Vietnam sejak tahun 2009-2015	Struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
5.	Riyadi dan Halim (2018)	<p>Variabel Independen: - Kepemilikan Pemerintah - IPO</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol: - <i>Size</i> - ROA - <i>Leverage</i> - Jenis Sektor</p>	Perusahaan milik pemerintah Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2007-2016.	<p>1. Struktur kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. <i>Initial Public Offering</i> untuk perusahaan kepemilikan pemerintah membuat tingkat penghindaran pajak menjadi semakin rendah</p>

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
6.	Purnomo (2016)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan keluarga</li> <li>- Kepemilikan pemerintah</li> <li>- Kepemilikan asing</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Agresivitas pajak</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ROA</li> <li>- <i>Leverage</i></li> <li>- <i>Capital Intensity</i></li> <li>- <i>Size</i></li> </ul>	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014	<p>1. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.</p> <p>2. Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif.</p> <p>3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.</p>
7.	Asfiyati (2012)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Corporate Governance</i></li> <li>- Kepemilikan Keluarga</li> <li>- Karakteristik Perusahaan</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010	<p>1. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>3. Karakteristik perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
8.	Sari dan Martani (2010)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Corporate Governance</i></li> <li>- Kepemilikan Keluarga</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agresivitas Pajak</li> </ul> <p>Variabel Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompensasi rugi fiskal</li> <li>- ROA</li> <li>- <i>Leverage</i></li> </ul>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2008.	<p>1. <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p> <p>2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara dimana struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada keluarga (Claessens *et al*, 2002). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan yang terkonsentrasi mampu mengurangi konflik keagenan, karena perusahaan dikelola serta dikontrol oleh pihak yang sama. Secara umum struktur kepemilikan terkonsentrasi didominasi oleh keluarga pendiri, mengakibatkan perlindungan yang lemah pada pemegang saham non-pengendali sehingga terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali (Liu dan Lu, 2007).

Berdasarkan penelitian oleh Rusydi dan Martani (2014) menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan kepemilikan keluarga di Indonesia mendorong untuk tidak melakukan *aggressive tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al* (2010) menunjukkan hasil serupa, yaitu pada perusahaan keluarga lebih kecil ketimbang kepemilikan non-keluarga terhadap *tax avoidance*. kepemilikan keluarga memilih membayar pajak lebih besar dibandingkan harus menanggung denda pajak dan terjadi rusaknya reputasi perusahaan. Kepemilikan keluarga mengharapkan terjadinya peningkatan modal dari para investor sehingga menjaga reputasi menjadi sangat penting. Namun dalam penelitian Purnomo (2016) menunjukkan hal berbeda yaitu kepemilikan keluarga

memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, yang menandakan bahwa kepemilikan keluarga cenderung akan lebih agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena terdapatnya keluarga konglomerat memiliki perusahaan di negara *Tax Haven Country*. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka hipotesis yang peneliti rumuskan sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.6.2. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah atau proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah (Riyadi dan Halim, 2018). Perusahaan kepemilikan pemerintah di Indonesia disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU No. 19 Tahun 2003, pasal 1). Pernyataan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan memiliki arti yaitu secara fisik negara memegang saham perusahaan tapi tidak dengan harta kekayaan perusahaan. Harta kekayaan perusahaan merupakan hak milik BUMN (Gukguk, 2006). Aktivitas BUMN dilakukan di bawah pengawasan negara yang ditugaskan kepada kementerian keuangan dan kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kementerian Keuangan memiliki peran fundamental seperti keputusan untuk membentuk BUMN, menambah atau mengurangi modal BUMN, dan membubarkan BUMN. Tugas Kementerian BUMN yaitu pengawasan dan pembinaan contoh aktivitas yang dilakukan seperti penggantian



manajemen atau pengembangan usaha. Berdasarkan penelitian Rusydi dan Martani (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Riyadi dan Halim (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Menurut UU No. 19 Tahun 2003 pasal 2 menyebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya dan mengejar keuntungan. Laba bersih yang semakin meningkat akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Kinerja BUMN diawasi oleh pihak kementerian BUMN, kinerja bagus yang dimiliki oleh direksi BUMN akan memperoleh promosi jabatan yang lebih tinggi. Hal ini mampu mendorong pihak direksi atau manajemen dari BUMN untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### **2.6.3. Pengaruh kepemilikan Asing terhadap penghindaran pajak**

Proporsi saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri merupakan kepemilikan asing (Rusyadi dan Martani, 2014). Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dalam kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan.

Penghindaran pajak cenderung lebih tinggi terjadi pada perusahaan yang beroperasi lintas negara jika dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi lintas domestik (Asfiyati, 2012). Harga transfer (*Transfer pricing*) diduga menjadi salah satu cara untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan global dan meminimalkan beban pajak. Harga transfer secara peyoratif diartikan dimana perusahaan multinasional yang menetapkan harga dengan maksud penghasilan dialokasikan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang terletak di negara berbeda untuk tujuan menurunkan laba kena pajak (Suandy, 2016). Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha3: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur struktur kepemilikan adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi *Cash ETR* dengan rumus membagi *Cash Tax Paid* dengan *Pretax Income* dan *GAAP ETR* dengan rumus membagi *Tax Expense* dengan *Pretax Income*.

Penelitian ini menguji dengan jumlah data observasi sebanyak 69 laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan objek berupa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017 yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
2. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

## **5.2. Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan dalam proses pengerjaannya. Keterbatasan yang dialami yaitu dalam memperoleh informasi struktur kepemilikan keluarga yang tidak secara eksplisit tersedia dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, jumlah kepemilikan pemegang saham struktur kepemilikan keluarga yang muncul dalam laporan keuangan dianggap sebagai kepemilikan keluarga. Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pembanding dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperpanjang interval waktu sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public policy*, 25(5), 574-595.
- Asfiyati. (2012). Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2010. Unpublished Manuscripts, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Brown, K. B. (2012). Comparative Regulation of Corporate Tax Avoidance: An Overview. In *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance* (pp. 1-21). Springer, Dordrecht.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
- Claessens, S., & Fan, J. P. (2002). Corporate governance in Asia: A survey. *International Review of finance*, 3(2), 71-103.
- Donnelley, R. G. (1988). The family business. *Family Business Review*, 1(4), 427-445.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., dan Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *the accounting review*, 83(1), 61-82.

- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ghozali, I.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponogoro.
- Gukguk, Erman Raja, Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara, Makalah, Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 26 Juli 2006
- Ha, N. T. T., & Phan, G. Q. (2017). The relationship between state ownership and tax avoidance level: empirical evidence from Vietnamese firms. *Journal of Asian Business Strategy*, 7(1), 1.
- Hanlon, M., dan Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *In Economics social institutions* (pp. 163-231). Springer, Dordrecht.

- Liu, Q. and Lu, Z., 2007. Corporate governance and earnings management in the Chinese listed companies: A tunneling perspective. *Journal of Corporate Finance*, 13(5), pp.881-906.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nuritomo dan Martani, D. (2014). Insentif Pajak, Kepemilikan, dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Studi Penerapan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007. *Simposium Nasional akuntansi 17*. Mataram.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74-95.
- Purnomo, L. C. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 9(1), 99-108.
- Riyadi, A., dan Halim, A. (2018). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Unpublished Manuscript, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rusydi, K., dan Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional akuntansi 17*. Mataram.

Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. In *The 3rd International Accounting Conference & The 2nd Doctoral Colloquium*. Bali.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi kelima*, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*

*Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*



### DAFTAR WEBSITE

Endarwati, O., (2018), “Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar”, Berita Industri, 11 Januari 2018 diakses dari [https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-](https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar)

[Pajak-Terbesar](https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar) pada tanggal 3 januari 2020.

<https://www.idx.co.id/>

www.kemenkeu.go.id., (2019), “Ini Capaian APBN 2018”, 3 Januari 2019 diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/> pada tanggal 25 november 2019.

[www.pwc.com](http://www.pwc.com)., (2014), “Survey Bisnis Keluarga 2014 Indonesia”, September 2014 diakses dari <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-family-business-survey-2014.pdf> pada tanggal 28 november 2019.



**LAMPIRAN I**  
**DATA SAMPEL 2014-2017**

KODE	TAHUN	FAM	GOV	FORG	CASH	GAAP
ARNA	2014	37.32	0	34.12	0.29	0.25
ARNA	2015	37.32	0	38.17	0.70	0.25
ARNA	2016	37.32	0	38.17	0.25	0.26
ARNA	2017	37.32	0	38.51	0.53	0.26
CPIN	2014	55.53	0	36.51	0.48	0.17
CPIN	2015	55.53	0	35.82	0.28	0.20
CPIN	2016	55.53	0	36.66	0.14	0.33
CPIN	2017	55.53	0	37.01	0.45	0.23
IGAR	2014	0	0	79.42	0.21	0.28
IGAR	2015	0	0	79.42	0.33	0.19
IGAR	2016	0	0	79.42	0.21	0.28
IGAR	2017	0	0	79.42	0.35	0.24
INCI	2014	69.09	0	1.84	0.03	0.04
INCI	2015	69.09	0	1.26	0.10	0.12
INCI	2016	69.09	0	1.26	0.23	0.25
INCI	2017	69.09	0	1.11	0.27	0.25
INAF	2014	0	80.66	0	0.39	0.41
INAF	2015	0	80.66	0	0.01	0.54
IPOL	2014	5	0	59.94	0.32	0.40
IPOL	2015	5	0	59.94	0.34	0.61
IPOL	2016	5	0	57.21	0.25	0.37
IPOL	2017	5	0	57.14	0.10	0.29
SMGR	2014	0	51.01	36.98	0.22	0.21
SMGR	2015	0	51.01	37.77	0.23	0.23
SMGR	2016	0	51.01	37.55	0.30	0.11
SMGR	2017	0	51.01	37.06	0.42	0.26
SRSN	2014	28.78	0	37.53	0.27	0.51
SRSN	2015	28.78	0	37.53	0.47	0.25
SRSN	2017	28.78	0	3.16	0.05	0.07
DVLA	2014	0	0	92.66	0.46	0.24
DVLA	2015	0	0	92.13	0.24	0.25
DVLA	2016	0	0	98.08	0.19	0.29
DVLA	2017	0	0	97.49	0.24	0.28

**LAMPIRAN I (LANJUTAN)****DATA SAMPEL 2014-2017**

KAEF	2014	0	90.03	1.24	0.15	0.25
KAEF	2015	0	90.03	1.24	0.20	0.25
KAEF	2016	0	90.03	0.74	0.19	0.29
KAEF	2017	0	90.03	0.62	0.16	0.26
ROTI	2014	26.5	0	61.6	0.19	0.25
ROTI	2015	25.12	0	61.6	0.20	0.28
ROTI	2016	20.79	0	63.94	0.27	0.24
ROTI	2017	21.06	0	70.77	0.26	0.27
TCID	2014	5.04	0	68.97	0.31	0.31
TCID	2015	5.04	0	68.77	0.09	0.07
TCID	2016	5.04	0	70.12	0.15	0.27
TCID	2017	5.04	0	70.1	0.27	0.26
UNVR	2014	0	0	84.99	0.23	0.25
UNVR	2015	0	0	93.58	0.24	0.25
UNVR	2016	0	0	93.79	0.24	0.25
UNVR	2017	0	0	93.04	0.26	0.25
AKPI	2014	70.03	0	0	0.12	0.33
AKPI	2015	70.03	0	0	0.67	0.36
AKPI	2016	70.03	0	0	0.35	0.31
AKPI	2017	70.03	0	0	0.52	0.58
PYFA	2014	23.08	0	0.16	0.44	0.37
PYFA	2015	23.08	0	0.16	0.35	0.32
PYFA	2016	23.08	0	0.16	0.32	0.27
PYFA	2017	23.08	0	0.16	0.22	0.26
ALDO	2014	14.32	0	4.13	0.37	0.25
ALDO	2015	14.32	0	4.13	0.30	0.26
ALDO	2016	14.57	0	4.13	0.31	0.25
ALDO	2017	14.57	0	4.13	0.30	0.25

**LAMPIRAN I (LANJUTAN)****DATA SAMPEL 2014-2017**

ULTJ	2014	39.3	0	0	0.33	0.25
ULTJ	2015	32.89	0	0	0.16	0.25
ULTJ	2016	55.24	0	0	0.27	0.24
ULTJ	2017	55.91	0	0	0.34	0.31
SMBR	2014	0	75.51	0	0.17	0.17
SMBR	2015	0	75.51	0	0.14	0.20
SMBR	2016	0	76.24	0	0.23	0.26
SMBR	2017	0	75.57	0	0.23	0.30

**DATA SAMPEL TRANSFORMASI 2014-2017**

KODE	TAHUN	FAM	GOV	FORG
ARNA	2014	1.58	0	1.55
ARNA	2015	1.58	0	1.59
ARNA	2016	1.58	0	1.59
ARNA	2017	1.58	0	1.6
CPIN	2014	1.75	0	1.57
CPIN	2015	1.75	0	1.57
CPIN	2016	1.75	0	1.58
CPIN	2017	1.75	0	1.58
IGAR	2014	0	0	1.91
IGAR	2015	0	0	1.91
IGAR	2016	0	0	1.91
IGAR	2017	0	0	1.91
INCI	2014	1.85	0	0.45
INCI	2015	1.85	0	0.35
INCI	2016	1.85	0	0.35
INCI	2017	1.85	0	0.32
INAF	2014	0	1.91	0
INAF	2015	0	1.91	0
IPOL	2014	0.78	0	1.78
IPOL	2015	0.78	0	1.78
IPOL	2016	0.78	0	1.76
IPOL	2017	0.78	0	1.76

# LAMPIRAN I (LANJUTAN)

## DATA SAMPEL TRANSFORMASI 2014-2017

SMGR	2014	0	1.72	1.58
SMGR	2015	0	1.72	1.59
SMGR	2016	0	1.72	1.59
SMGR	2017	0	1.72	1.58
SRSN	2014	1.47	0	1.59
SRSN	2015	1.47	0	1.59
SRSN	2017	1.47	0	0.62
DVLA	2014	0	0	1.97
DVLA	2015	0	0	1.97
DVLA	2016	0	0	2
DVLA	2017	0	0	1.99
KAEF	2014	0	1.96	0.35
KAEF	2015	0	1.96	0.35
KAEF	2016	0	1.96	0.24
KAEF	2017	0	1.96	0.21
ROTI	2014	1.44	0	1.8
ROTI	2015	1.42	0	1.8
ROTI	2016	1.34	0	1.81
ROTI	2017	1.34	0	1.86
TCID	2014	0.78	0	1.84
TCID	2015	0.78	0	1.84
TCID	2016	0.78	0	1.85
TCID	2017	0.78	0	1.85
UNVR	2014	0	0	1.93
UNVR	2015	0	0	1.98
UNVR	2016	0	0	1.98
UNVR	2017	0	0	1.97
AKPI	2014	1.85	0	0
AKPI	2015	1.85	0	0
AKPI	2016	1.85	0	0
AKPI	2017	1.85	0	0
PYFA	2014	1.38	0	0.06
PYFA	2015	1.38	0	0.06
PYFA	2016	1.38	0	0.06
PYFA	2017	1.38	0	0.06

**LAMPIRAN I (LANJUTAN)**

**DATA SAMPEL TRANSFORMASI 2014-2017**

ALDO	2014	1.19	0	0.71
ALDO	2015	1.19	0	0.71
ALDO	2016	1.19	0	0.71
ALDO	2017	1.19	0	0.71
ULTJ	2014	1.61	0	0
ULTJ	2015	1.53	0	0
ULTJ	2016	1.75	0	0
ULTJ	2017	1.76	0	0
SMBR	2014	0	1.88	0
SMBR	2015	0	1.88	0
SMBR	2016	0	1.89	0
SMBR	2017	0	1.88	0

**LAMPIRAN II**  
**HASIL PENGUJIAN SPSS**  
**STATISTIK DESKRIPTIF SEBELUM TRANSFORMASI**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FAM	69	.00	70.03	21.9028	24.57854
GOV	69	.00	90.03	16.9320	30.33799
FORG	69	.00	98.08	34.9646	34.40868
CASH	69	.01	.70	.2739	.13137
GAAP	69	.04	.41	.2572	.07382
Valid N (listwise)	69				

**STATISTIK DESKRIPTIF SETELAH TRANSFORMASI**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FAM	69	.00	1.85	.8877	.75423
GOV	69	.00	1.96	.3777	.75547
FORG	69	.00	2.00	1.0674	.81201
CASH	69	.01	.70	.2739	.13137
GAAP	69	.04	.61	.2712	.09847
Valid N (listwise)	69				



## ANALISIS REGRESI DEPENDEN CASH

### 1. UJI NORMALITAS CASH SEBELUM TRANSFORMASI

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12745353
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.088
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### 2. UJI NORMALITAS SETELAH TRANSFORMASI

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12603425
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.100
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### 3. UJI MULITKOLINEARITAS

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.274	.056	4.918	.000		
	FAM	.001	.001	.128	.513	.376	2.657
	GOV	-.001	.001	-.203	.284	.402	2.490
	FORG	-5.623E-5	.001	-.015	.938	.394	2.536

a. Dependent Variable: CASH

### 4. UJI AUTOKORELASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.282 <sup>a</sup>	.079	.037	.12893	2.158

a. Predictors: (Constant), FORG, GOV, FAM

b. Dependent Variable: CASH

### 5. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.121	.017	6.947	.000	
	FAM	-.052	.044	-.277	.247	
	GOV	-1.253E-5	.001	-.004	.985	
	FORG	.000	.000	-.101	.503	

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## 6. Uji Regresi Berganda

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341 <sup>a</sup>	.116	.075	.11398

a. Predictors: (Constant), FORG, FAM, GOV

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.111	3	.037	2.850	.044 <sup>b</sup>
	Residual	.845	65	.013		
	Total	.956	68			

a. Dependent Variable: CASH

b. Predictors: (Constant), FORG, FAM, GOV

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.254	.050		5.054	.000
	FAM	.001	.001	.267	1.446	.153
	GOV	-.001	.001	-.129	-.697	.488
	FORG	.000	.001	.041	.226	.822

a. Dependent Variable: CASH

## ANALISIS REGRESI DEPENDEN GAAP

### 1. UJI NORMALITAS GAAP SEBELUM TRANSFORMASI

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07237472
Most Extreme Differences	Absolute	.169
	Positive	.117
	Negative	-.169
Test Statistic		.169
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### 2. UJI NORMALITAS SETELAH TRANSFORMASI

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0106797
	Std. Deviation	.09423155
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.097
	Negative	-.102
Test Statistic		.102
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### 3. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.284	.032		8.803	.000		
	FAM	-.001	.001	-.186	-.929	.356	.376	2.657
	GOV	-.001	.000	-.210	-1.083	.283	.402	2.490
	FORG	.000	.000	-.105	-.536	.594	.394	2.536

a. Dependent Variable: GAAP

### 4. UJI AUTOKORELASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.163 <sup>a</sup>	.027	-.018	.17771	1.739

a. Predictors: (Constant) FAM, GOV, FORG

b. Dependent Variable: GAAP

### 5. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.036	.027		1.309	.195
	FAM	.000	.001	.177	.904	.370
	GOV	.000	.000	.081	.426	.671
	FORG	.001	.000	.335	1.752	.085

a. Dependent Variable: abs\_RES

## 6. UJI REGRESI BERGANDA

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.338 <sup>a</sup>	.114	.073	.11030

a. Predictors: (Constant), FORG, FAM, GOV

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.102	3	.034	2.794	.047 <sup>b</sup>
	Residual	.791	65	.012		
	Total	.893	68			

a. Dependent Variable: GAAP

b. Predictors: (Constant), FORG, FAM, GOV

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.246	.049		5.052	.000
	FAM	.001	.001	.249	1.348	.182
	GOV	-.001	.001	-.136	-.732	.467
	FORG	.000	.001	.115	.636	.527

a. Dependent Variable: GAAP